**BAB II**

**KERJASAMA EKONOMI INDONESIA – JEPANG MELALUI *INDONESIA–JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA)**

1. **Tinjauan Tentang Kerjasama Internasional**
2. **Konsep Kerjasama Ditinjau Dari Hubungan Internasional**

Hubungan antar Negara atau juga kerjasama dalam masyarakat internasional seringkali didasari oleh adanya persamaan di antara mereka, misalnya : bahasa, geografi, ideologi, dan juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat hubungan kerjasama tersebut dengan Negara lain.

Ketergantungan ekonomi antar Negara merupakan salah satu kondisi dasar di dalam melakukan hubungan internasional, tidak satupun Negara secara ekonomi dapat berdiri sendiri dalam waktu yang lama. Usaha dalam melangsungkan hidup dalam masa yang lama menuntut setiap Negara untuk menjalin relasi perdagangan dengan negara-negara dibelahan dunia yang lainnya.

Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa kebutuhan suatu Negara tidak hanya bisa dipenuhi oleh suatu produk yang dimilikinya, tetapi kebutuhan tersebut bisa didapati dari Negara lain yang memiliki. Maka setiap Negara yang berkepentingan harus menjalin hubungan suatu relasi atau hubungan yang lebih erat di dasarkan atas kepentingan masing-masing Negara. Dalam hal ini akhirnya setiap Negara perlu melakukan perbaikan ekonomi nasionalnya dengan memilih kerjasama sebagai suatu alternatif jawaban, seperti yang dikatakan oleh **Koesnadi Kartasasmita,** bahwa :

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi tujuan yang sama, serta keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang salah membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara namun kepentingan tersebut tidak identik”. (1997:20)**

Keterkaitan antara kerjasama dengan peningkatan pembangunan ekonomi nasionl untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bahwa kerjasama dapat memberikam beberapa sumbangan yang terakhirnya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi yaitu suatu Negara memperluas pasar dari hasil produknya dan memungkinkan suatu Negara tersebut menggunakan teknologi yang lebih baik kondisinya dibanding yang terdapat di dalam negaranya. Adapun peranan kerjasama internasional juga dapat memperluas pasaran ekonominya sesuai dengan kepentingan dari tujuan kerjasama tersebut. Tujuan akhirmya yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerjasama ditentukan oleh persamaan fundamental dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

Adapun kerjasama menurut **Dr. Budiono** ada tiga bagian :

1. Kerjasama Global

Dasar utama kerjasama global ini adalah hasrat yang kuat dari berbagai bangsa untuk membentuk suatu wadah yang bisa mempersatukan cita-cita bersama. Dan juga kesadaran dari masing-masing Negara untuk tidak mementingkan kepentingan nasional mereka di dalam masyarakat bangsa-bangsa menurut cara masing-masing, kesadaran tersebut di atas telah membangkitkan bangsa-bangsa eropa untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919, guna mencegah terulangnya kembali timbulnya perang dunia I, sayangnya usaha tersebut hanya mampu bertahan sampai perang dunia II. Karena ketakutan akan korban perang yang meningkat maka dibentuknya perserikatan bangsa-bangsa pada 26 Juni 1945 dengan ditandai oleh ditandatanganinya Perjanjian San Fransisco.

1. Kerjasama Regional

Kerjasama Regional merupakan kerjasama antar Negara yang secara gografis letaknya berdekatan. Kerjasama tersebut bisa berada dalam bidang pertahanan tetapi bisa juga dalam bidang lain seperti pertanian, hukum, sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Salah satunya kerjasama Masyarakat Ekonomi Eropa yang lahir pada tahun 1970 dimana telah berhasil memantapkan kerjasama yang mengarah pada proses integrasi regional atau kawasan serta dalam memecahkan kesejahteraan regional. Menurut Dr. Budiono, organisasi kerjasama regional sekarang merupakan masalah yang amat luas dan rumit.

1. Kerjasama Fungsional

Kerjasama ini menjadi sangat kompleks karena semakin banyaknya lembaga kerjasama yang ada sehingga diperlukan kesepakatan dan keputusan politik. Disini terlihat bahwa kerjasama fungsional tidak bisa dilepaskan dari power. Kerjasama fungsional berangkat dari fragmatisme pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan tertentu dari masing-masing mitra kerjasama. Dengan demikian kerjasama fungsional tidak dapat terlaksana bila diantara mita kerjasama yang ada tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan dirinya oleh yang lain. Adapun kendala yang dihadapi adalah terletak pada idiologi, politik dan territorial issues.

Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga iasenantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan sebagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa (Soekanto, 1990: 72).

1. **Tujuan Kerjasama Ekonomi**

Kerjasama internasional mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Membebaskan bangsa-bangsa di dunia dari kemiskinan dan kelaparan
2. Membebaskan bangsa-bangsa dari keterbelakangan di bidang ekonomi
3. Memajukan perdagangan
4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
5. Meningkatkan kestabilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan
6. Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
7. Meningkatkan dam mempererat tali persahabatan antarbangsa di dunia.

Tujuan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabaila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Secara rinci, kerjasama ekonomi internasional bertujuan sebagai berikut :

1. Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri

Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu dapat menjual ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan.

1. Meningkatkan Produktivitas Dalam Negeri

Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat.

1. Memperluas Lapangan Kerja

Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena ketercukupan sumber-sumber produksi maka proses produksi bisa berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja.

1. Meningkatkan Pendapatan Kerja Melalui Ekspor

Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi dari pada di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan meningkat.

1. Memperkuat Rasa Persahabatan

Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan**.[[1]](#footnote-1)**

1. **Hambatan Kerjasama Ekonomi Internasional**

Dalam kerjasama ekonomi internasional sering dijumpai hambatan atau rintangan yang pada dasarnya merugikan suatu negara. Hambatan tersebut berupa:

1. **Tarif**

Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi permintaan konsumen menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tariff pajak yang dikenakan. Perbedaan utama antara tariff dan proteksi lainnya adalah bahwa tarif memberikan pemasukan kepada pemerintah sedangkan kouta tidak.

1. **Kouta**

Kouta adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diperdagangkan.Ada tiga macam kouta, yaitu kouta impor, kouta produksi, dank outa ekspor. Kouta impor adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diimpor, kouta produksi adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diproduksi, dan kouta ekspor adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor. Tindakan umtuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor ada yang dilakukan secara sukarela yang disebut sebagai pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restiction = VER) VER adalah kesepakatan antara negara pengekspor untuk membatasi jumlah barang yang dijualnya ke negara pengimpor. Tujuan dari kouta ekspor adalah untuk keuntungan negara pengekspor, agar dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Kouta produksi bertujuan untuk mengurangi jumlah ekspor. Dengan demikian, diharapkan harga di pasaran dunia dapat ditingkatkan.

Tujuan utama pelaksanaan kouta adalah untuk melindungi produksi dalam negeri dari serbuan-serbuan luar negeri.

Dampak kebijakan kouta bagi negara importir :

1. Harga barang melambung tinggi,
2. Konsumsi terhadap barang tersebut menjadi berkurang,
3. Meningkatnya produksi dalam negeri.

Dampak kebijakan kouta bagi negara eksportir :

1. Harga barang turun,
2. Kunsumsi terhadap barang tersebut menjadi bertambah,
3. Produksi di dalam negeri berkurang.
4. **Dumping dan Diskriminasi Harga**

Praktik diskriminasi harga secara internasional disebut dumping.yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti dumping (dengan tarif impor yang lebih tinggi).

Kebijakan ini hanya berlaku sementara, harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional. Predatory dumping dilakukan dengan tujuan untuk mematikan persaingan di luar negeri. Setelah persaingan di luar negeri mati maka harga di luar negeri akan di naikkan untuk menutup kerugian sewaktu melakukan predatory dumping.

1. **Subsidi**

Kebijakan subsidi biasanya diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.

1. **Larangan Impor**

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya poduk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi**.[[2]](#footnote-2)**

1. **Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional**

Banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional karena menyadari bahwa kerjasama ekonomi internasional memberikan manfaat. Kerjasama ini dapat dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang, atau antara sesama negara maju atau sesama negara berkembang. Kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar barang mentah dengan barang jadi, atau pertukaran barang mentah dengan modal dan tenaga ahli. Sedangkan kerjasama antara sesame negara maju diwujudkan dalam bentuk pertukaran tenaga ahli serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dilihat dari letak gografisnya, kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Kerja sama ekonomi internasional, yaitu kerja sama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia.
2. Kerja sama ekonomi regional yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu.
3. Kerja sama ekonomi interregional, yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan dengan negara-negara yang berada di kawasan lain.

Berdasarkan banyaknya negara peserta, kerja sama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

1. Kerja sama ekonomi bilateral, yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara.
2. Kerja sama ekonomi multilateral, yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara**.[[3]](#footnote-3)**

* Berikut adalah contoh-contoh Kerja Sama Ekonomi Internasional :

1. **Bilateral**

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerja sama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contoh: pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia.

* Indonesia – Korea Utara

Indonesia dan Korea Utara (Korut) sepakat meningkatkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Meski demikian, kedua pihak belum bisa memastikan target angka perdagangan yang spesifik. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa perdagangan kedua negara memenuhi peluang untuk bisa lebih ditingkatkan. Mengenai masalah investasi saat ini masih tahapan exploration atau penjajakan. Oleh karena itu dalam pembahasannya tadi sifatnya explorated atau mengkaji bersama kerja sama di bidang investasi tersebut.

Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea/Korut Kim Yong-nam melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Kim ke Indonesia dimulai sejak tanggal 13 Mei. Orang nomor dua di Korut ini berada di Indonesia selama empat hari.Kunjungan Kim ke Indonesia merupakan yang ketiga kalinya setelah 2002 dan 2005 lalu. Kim hadir untuk memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kunjungannya kali ini, Kim didampingi tiga orang setingkat menteri. Selain melakukan pertemuan bilateral, Presiden SBY juga menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan untuk menghormati Kim dan rombongan. Dalam kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden SBY menginstruksikan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menindaklanjuti berbagai hal yang telah dibahas dalam pertemuan bilateral. Dalam pertemuan selama hampir 1,5 jam, kedua pemimpin juga membahas pentingnya kerja sama di bidang budaya, olahraga,dan obat tradisional.

Marty menjelaskan, pertemuan bilateral yang dilakukan dengan suasana keterbukaan. Keduanya juga membahas berbagai masalah kerja sama dan isu-isu di kawasan. Terkait hubungan bilateral, kedua Presiden menegaskan perlunya peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Antara lain ada tekad dan kesepahaman untuk meningkatkan di bidang hubungan politik, kerja sama, dan saling mengunjungi para pejabat kedua negara. Intinya pertemuan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi politik antara kedua negara.

Kim menyampaikan undangan Kim Jong-un kepada Presiden SBY untuk berkunjung ke Korut pada waktu yang tepat. Indonesia merupakan negara yang paling bisa berperan sebagai mediator perdamaian antara Korut dan Korea Selatan. Indonesia apa pun selalu bersahabat. Indonesia selalu bersahabat dengan Korea Utara dan tak pernah putus hubungan sejak Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden SBY,

* Indonesia – Suriname

Pada bulan Juli 1991 telah berkunjung rombongan Menteri Sosial, Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Suriname kepada Menteri Pertanian RI, pokok pembicaraan mengenai kemungkinan diadakan kerjasama 2 negara di bidang pertanian. Pada kesempatan tersebut Bapak Menteri Pertanian RI memberikan bibit bawang putih varietas Tawang Mangu Baru dan bawang merah varietas Bima Tegal dengan berat masing-masing 5,5 kg untuk dicoba di Suriname.

Pada bulan Juni 1993 telah berkunjung tim inventaris industri kelapa sawit dan gula Indonesia ke Suriname. Pada bulan Mei 1994 rombongan Presiden Suriname telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Pihak Suriname berkeinginan untuk mengimpor CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 4000-6000 ton pertahun dari Indonesia dan membeli the (raw material) untuk diolah di Suriname. Pada bulan Juli 1994 sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Suriname ke Indonesia, rombongan pengusaha Indonesia telah berkunjung ke Suriname dalam rangka mengadakan orientasi/penjajakan kemungkinan mengadakan investasi dan kerjasama perdagangan dengan mitra dagang Suriname di bidang sumberdaya hutan, kelapa sawit, industri alat berat pertanian, dll. Pada bulan September 1997 Deptan memberikan informasi bahwa belum dipenuhinya permintaan bantuan kepada Suriname oleh pihak Indonesia disebabkan karena belum adanya kejelasan mengenai pembiayaan serta bentuk kerjasama yang diinginkan.

1. **Regional**

Kerja sama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara-negara kawasan/daerah tertentu, yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan.

Badan Kerja Sama Regional

1. ASEAN ( Association of South East Asia Nation )

ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, lima negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di berbagai bidang.

1. AFTA ( ASEAN Free Trade Area )

AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah forum kerja samaantar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesame negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi.

Pembentukan AFTA berasal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992.Berikut ini beberapa tujuan AFTA.

* Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN.
* Meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN.
* Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN

1. APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation )

APEC merupakan forum kerja sama negara dikawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara negara-negara anggota. Keberadaan APEC atas prakarsa Bob Hawke (perdana menteri Australia).Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan pedagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020.Untuk mencapai tujuannya APEC dalam melakukan kegiatannya selalu berlandaskan pada prinsip kesepakatan bersama yang sifatnya tidak mengikat, dialog terbuka, serta prinsip saling menghargai pandangan dan pendapat seluruh anggota. Keputusan yang diambil oleh APEC dibuat berdasarkan konsensus dan kesepakatan yang sifatnya sukarela.

Indonesia merupakan salah satu negara pencetus APEC. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC II di Kota Bogor pada tahun 1994. Keikutsertaan Indonesia dalam forum APEC di harapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, investasi, dan perdagangan internasional. Selain itu, keanggotaan Indonesia juga diharapkan dapat meperlancar dan mempererat kerja sama non-ekonomi antar sesama negara-negara anggota pada tingkat bilateral maupun multilateral.

1. EU ( European Union )

European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerja sama regional di bidang ekonomi dan politik negara-negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian komunitas energi atom (European Atomic Energy Community) dan komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi yaitu Masyarakat Eropa (ME) dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa. Kegiatan Uni Eropa pada awalnya hanya terbatas di bidang perdagangan, akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota Uni Eropa, berkambang pula bentuk kerja sama itu. Kerja sama tersebut adalah dalam bidang ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politk.

1. **Internasional**
2. ADB ( Asia Development Bank )

ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan pada tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka waktu yang panjang serta bunga yang rendah

1. EFTA ( European Free Trade Area )

EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal**.[[4]](#footnote-4)**

1. **Sejarah Diplomasi Antara Indonesia Dan Jepang**
2. **Hubungan Diplomasi Antara Indonesia dan Jepang**

Hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka namun hubungan antara keduanya hanya dalam perdagangan saja antara pedagang Jepang dengan pedagang Hindia Belanda. Di dalam era Perang Dunia ke-2 Indonesia menjadi negara jajahan Jepang selama 3,5 tahun dan Indonesia menerima kerugian besar setelah merdeka dikarenakan eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang historis tersendiri antara Indonesia dan Jepang.

Pada tahun 1958 Jepang dan Indonesia memulai hubungan diplomatik bilateral secara resmi dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang disertai dengan perjanjian pampasan perang dimana Jepang membayar kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang di era Perang Dunia ke-2. Perjanjian tersebut diawali dengan kunjungan Jepang ke Indonesia sejak tahun 1955 dan Jepang saat itu memang memperbaiki hubungannya dengan negara-negara di Asia setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2.

Hubungan baru yang dinamai “benang merah” berawal dari momentum tersebut untuk mengawali *new strategic partnership* dalam berbagai bidangseperti ekonomi, teknologi, dan pendidikan Indonesia.Dalam momentum 50 tahun persahabatan Indonesia-Jepang telah banyak hubungan kerjasama yang membangun antara keduanya seperti pemberian teknologi dan investasi yang besar oleh Jepang untuk membangun perekonomian Indonesia dan menghasilkan banyaknya lapangan kerja. Sedangkan Indonesia telah memberikan banyak sumber daya alamnya untuk di ekspor ke Jepang terutama gas alam, batu bara dan lemak nabati untuk Jepang. Selain sumber daya alam Indonesia juga memasok banyak sumber daya manusia bagi Industri Jepang di Indonesia. Menurut penulis hubungan kerjasama bilateral antara keduanya seperti simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan memungkinkan untuk terus diperbarui agar dapat menghadapi tantangan-tantangan dalam globalisasi saat ini.

Perdana Menteri Jepang yaitu Fukuda mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan dan kelancaran hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dengan mencetuskan Doktrin Fukuda pada tahun 1970an. Doktrin tersebut sangat mempengaruhi pandangan rakyat Indonesia menyadari bahwa Jepang benar-benar menginginkan hubungan yang saling menguntungkan dan bersih antara Jepang dan Indonesia. Esensi dan Doktrin Fukuda tersebut mencakup tiga hal yaitu Jepang tidak akan menjadi negara adidaya militer. Kedua, Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan saling percaya terhadap negara-negara Asia Tenggara. Terakhir, Jepang akan bekerjasama dengan positif dengan seluruh negara ASEAN sebagai mitra yang sejajar. Dengan adanya Doktrin Fukuda tersebut pemerintahan Soeharto membuka hubungan yang lebih besar dari sebelumnya.

1. **Perkembangan Hubungan Diplomasi Antara Indonesia Dan Jepang**

Hubungan Indonesia-Jepang ternyata masih sejalan dan baik peningkatanya, terbukti banyaknya kerjasama investasi Jepang ke Indonesia khususnya pada bidang infrastruktur.Jepang telah terbukti juga dengan kemampuannya di tingkat diplomasi, kekuatan ekonomi, potensi militer, dan kini sebuah acuan Indonesia dalam hubungan bilateral kedua belah negara tersebut. Kalau kita lihat perkembangan hubungan Indonesia-Jepang saat ini, bukan hanya kerjasama dibidang infrastruktur saja, melainkan Indonesia telah memiliki banyak komoditi yang dapat menjadi sebuah andalan yaitu komoditi non-migas.Ada sekitar 50 komoditi non-migas yang telah memasuki pasar Jepang dan sekiranya memang kalau kita lihat potensi komoditi itu masih berasal dari hasil perikanan, souvenir, hasil pertanian seperti kopi, teh, coklat dan rempah-rempah.

Terkait dengan kerjasama Indonesia-Jepang, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah melakukan segala bentuk usaha positifnya dalam perkembangan perekonomian nasional. Khususnya terkait program MP3EI yang digagas oleh Hatta Rajasa dan Tim Ekonomi, karena ini membuktikan bahwa dengan adanya hubungan yang bersifat bilateral antar negara ini, niscaya dapat membantu program pembangunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sendiri.

Dalam upaya hubungan bilateral Indonesia-Jepang kiranya memamg Indonesia perlu lebih meningkatkan upaya dari sistem pemasaran, pengawasan mutu produk, pelabelan dan sertifikasi hasil uji. Dengan adanya posisi strategis Jepang tersebut, otomatis telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional di berbagai bidang kehidupan, baik untuk program pembangunan nasional maupun keikutsertaannya dalam menjaga ketertiban dunia. Dan hal itu pula sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 melalui berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral.Bukan itu saja, Indonesia juga mendapat pengakuan dari pihak Jepang bahwa investasi Jepang di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup fantastis. Dari cara Jepang memandang Indonesia utamanya adalah kini Indonesia bisa menjadi sebuah negara besar dalam hal perekonomian di kawasan Asia Tenggara.

Selain pula dengan nama Indonesia yang semakin besar kini, Indonesia telah mempunyai daya tarik lain untuk tujuan investasi Jepang, seperti contohnya, ketersedian tenaga kerja yang cukup, rajin dan cepat dalam penguasaan teknologi, serta Indonesia sendiri kini telah dianggap negara yang paling baik terhadap Jepang dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia. Perkembangan selanjutnya adalah, Indonesia sebagai salah satu negara besar memiliki komitmen yang jelas untuk pertumbuhan perekonomian bangsa. Walaupun terdengar kabar masih riuhnya permasalahan korupsi yang menimpa instansi, namun hal itu tidak menjadi sebuah kendala yang besar dalam perekonomian bangsa ini.

Hatta Rajasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian pada saat pemerintahan SBY tetap berkomitmen tegas bahwa Indonesia harus menjadi negara besar dalam perekonomian bangsa. Sejarah mengatakan sejak hubungan Indonesia-Jepang berkelanjutan, banyak hasil positif yang diperoleh bangsa ini.Dan salah satunya adalah bidang infrastruktur. Melalui program MP3EI yang telah di gagas oleh Hatta Rajasa dan tim ekonomi membuka peliuang Indonesia menjadi sebuah negara maju dalam perekonomian nasionalnya. Torehan positif pembangunan perekonomian Indonesia saat ini telah teruji sekali, dikala negara-negara Eropa dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan Indonesia tetap pada kondisi perekonomian yang cukup stabil, dengan kata lain komitmen cerdas pemerintah saat itu dalam mencari solusi untuk bangsa ini telah teruji sekali, dan membuktikan pula Indonesia bisa menjadi negara besar dalam perekonomian negara-negara maju**.[[5]](#footnote-5)**

1. **Hubungan Perdagangan Antara Indonesia dan Jepang**
2. **Hubungan Perdagangan Indonesia – Jepang Sebelum Kerjasama *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Dilaksanakan**

Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang yang telah terjadi bertahun-tahun tersebut membuat kedua negara tersebut menjadi sangat dekat. Selain itu, Jepang telah membantu Indonesia di berbagai bidang antara lain bidang industri, teknologi, perekonomian, dan lain-lain.

Bagi Indonesia pada bidang perdagangan, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia.Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007)**.[[6]](#footnote-6)**

**Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, *pulp*, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.**

**Ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi oleh komoditi migas. Jepang yang merupakan negara industri menumbuhkan supply bahan baku untuk membuat industrinya terus berjalan, dan Indonesia yang memiliki sumber daya alam tersebut dijadikan Jepang sebagai negara tujuan impor bahan baku Jepang. Selain itu, pasar Indonesia yang cukup besar serta sifat masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif dijadikan Jepang sebagai pasar untuk ekspor produk-produk industri Jepang, seperti elektronik dan otomotif.**

1. **Hubungan Perdagangan Indonesia – Jepang setelah *Indonesia – Japan Economic partnership Agreement* (IJEPA) dilaksanakan.**

Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama bilateral untuk meningkatkan salah satunya perdagangan antara kedua negara tersebut. Hubungan perdagangan kedua negara tersebut sudah sangat baik sebelum adanya perjanjian tersebut, dan setelah adanya perjanjian tersebut hubungan perdagangan Indonesia-Jepang semakin meningkat.

Pada awal berlakunya Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada Juli 2007-Juni 2008,ekspor Indonesia ke Jepang sebesar US$ 26,082,260. Sedangkan pada Juli 2010-Juni 2011 terjadi peningkatan menjadi US$33,535,296**.[[7]](#footnote-7)** Setelah diberlakukannya IJEPA terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang. Hal tersebut merupakan dampak positif yang dirasakan pihak Indonesia dari perjanjian tersebut. Peningkatan itu juga menjadi hal positif bagi hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang

Berdasarkan data aktual empat tahun terakhir, nilai ekspor Indonesia ke Jepang rata-rata tumbuh sebesar 14,29 % per tahunnya. Skema tarif IJEPA berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 5,23 % (antara presentase) atau menjadikan pertumbuhan ekspor 1,58 kali lipat dibandingkan bila tidak ada skema tarif IJEPA. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan tetap sebesar 14,29 % per tahun, dalam dua tahun mendatang (Juli 2011 – Juni 2012) dan (Juli 2012 – Juni 2013) nilai ekspor Indonesia ke Jepang berpotensi meningkat masing-masing menjadi 8,326,660,120 dan US$ 43,802,599,468,189**.[[8]](#footnote-8)**

Walau secara nominal dan presentase, Indonesia mengalami pertumbuhan distribusi ekspor ke Jepang yang positif akibat IJEPA. Pangsa Jepang sebagai tujuan ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Bila posisi Jepang pada tahun 1995 masih memegang pangsa tujuan ekspor sebesar 28 % pada tahun 2000 turun menjadi 23 % dan pada tahun 2010 terus menurun menjadi 16 %. Hal ini dapat menunjukan pasar ekspor Indonesia yang semakin terdiverifikasi.

Selama periode simulasi Juli 2010 – Juni 2011 selama berlakunya skema tarif preferensial IJEPA total nilai ekspor aktual Jepang ke Indonesia adalah US$ 17,982,250,000. Dampak yang diberikan dengan adanya skema tarif preferensial IJEPA bagi ekspor Jepang ke Indonesia adalah meningkatnya total nilai ekspor Jepang ke Indonesia rata-rata sebesar US$ 93,490,000 per tahunnya**.[[9]](#footnote-9)**

Bersumber analisis data aktual empat tahun terkahir, nilai ekspor Jepang ke Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 33,61 % per tahunnya. Hasil simulasi menunjukan bahwa nilai ekspor tanpa skema tarif IJEPA hanya akan meningkat sebesar 33,17 % saja per tahunnya. Skema tarif IJEPA berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekspor Jepang ke Indonesia sebesar 0,43 % (secara presentase)**.[[10]](#footnote-10)**

1. **Tinjauan Tentang IJEPA**
2. **Mengenai *Economic Partnership Agreement* (EPA)**

*Economic Partnership Agreement* (EPA) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan. EPA dan FTA (*Free Trade Area*) memiliki kesamaan dalam hal penurunan atau penghapusan tarif, namun cangkupan dalam EPA tidak hanya mengenai penurunan atau penghapusan tarif melainkan mencangkup berbagai bidang lain, seperti pembebasan atau memfasilitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, hak kekayaan Intelektual (HKI) serta aturan kebijaksanaan persaingan.

Dengan melakukan kerjasama dalam kerangka EPA, maka negara dapat memperoleh tarif yang lebih rendah dari pada negara lain. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia telah menetapkan prinsip *Most Favored Nation* (MFN) sehingga perlakuan suatu negara terhadap semua negara di dunia harus sama, namun jika dua negara menyepakati EPA maka negara tersebut dapat menurunkan tarif lebih rendah dibandingkan dari pada tarif MFN. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat dengan melakukan EPA.

Penentuan tarif EPA digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu :

* 1. Sewaktu tarif EPA diimplementasikan tingkat tarif menjadi 0 %

Setelah EPA diimplementasikan tarif EPA menjadi 0 %, sehingga terdapat keuntungan memanfaatkan EPA kecuali tingkat MFN juga 0%

* 1. Penghapusan tarif secara bertahap dalam periode tertentu setelah diimplementasikan

Setelah EPA diimplementasikan, tingkat EPA berkurang secara bertahap hingga akhir tingkat EPA menjadi 0 %. Biasanya, setelah EPA berlaku, tingkat tarif akan berkurang dalam 3,5, 7 atau 0 tahun, kemudian tingkat EPA akan menjadi 0 % setelah periodewaktu tertentu.

* 1. Tidak ada penghapusan tarif atau pengurangan (tarif MFN yang berlaku)

Dalam kasus ini, EPA tidak melakukan penghapusan atau pengurangan tarif sehingga tingkat MFN yang harus digunakan.

Dalam peneran EPA, Ketentuan Asal Barang merupakan suatu syarat penting. Ketentuan Asal Barang adalah syarat untuk menilai apakah poduk yang akan diimpor memenuhi syarat atau tidak. Proses ini diperlukan dikarenakan target produk dalam EPA haruslah barang yang berasal dari negara yang mengikat perjanjian. Sehingga eksportir harus membuktikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang bahwa barang yang akan di ekspor benar-benar barang yang di buat di negara eksportir agar dapat memperoleh Surat Keterangan Asal.

Selain itu, untuk memperoleh penurunan tarif, eksportir dan importir juga perlu untuk mempunyai Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan Asal membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh tarif EPA. Surat Keterangan Asal diperoleh oleh eksportir yang lalu dikirim kepada importir untuk diserahkan kepada pegawai pabean dinegara importir untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang.

Jepang yang merupakan negara maju, saat ini telah membuat 8 perjanjian EPA dan beberapa perjanjian EPA lainnya masih dalam tahap negosiasi, sebagian besar perjanjian yang dilakukan dengan negara-negara di Asia, salah satunya adalah dengan Indonesia yang telah sepakati pada tahun 2007 dan mulai berlaku pada Juli 2008.

1. **Sejarah Terbentuknya Kerjasama IJEPA**

Dalam politik ekonomi internasional terdapat beberapa persoalan penting yaitu hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi, pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga dan sifat luasnya globalisasi ekonomi negara maju dengan negara dunia ketiga. Dalam hal ini masalah disparitas antara neagara maju dengan negara dunia ketiga menjadi agenda ekonomi politik internasional semakin penting. Dalam konteks tersebut kemudian liberalisme ekonomi yang diimplementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun dengan negara maju menjadi formula bagi negara berkembang dalam peningkatan kapabilitas perekonomian.

Negara berkembang yang sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Latin dan sebagian besar negara berkembang lainnya saat ini seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan sedang mencoba menjalankan standar ekonomi nasionalnya seperti negara maju.Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk ke dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara lain yang lebih maju. Salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam bentuk IJEPA (*Indonesia –Japan Economic Partnership Agreement*).

Demi lebih mempererat hubungan kerjasama yang dijalin oleh kedua Negara yaitu Indonesia-Jepang dalam bidang Industri, dan untuk merealisasikan kerjasama yang telah direncanakan, setalah penandatanganan *Momorandum Of Understanding* (MoU) pada tanggal oleh kedua belah pihak sebagai tanda bahwa mereka telah menjalin suatu kerjasama yang baik, terencana dan terarah, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang mengadakan pertemuan selama menjalin kerjasama ini berjalan. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari mekanisme kerjasama antara Indonesia-Jepang dalam memperlancar terlaksananya hubungan kerjasama tersebut dengan baik.

Peningkatan hubungan Indonesia dan Jepang semakin dapat momentumnya pada tahun 2007.Pada tanggal 20 agustus, Indonesia dan Jepang menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi (IJEPA). Pembentukan EPA sendiri berawal ketika proposal pembentukan FTA yang ditawarkan oleh PM Jepang Junichiro koizumi kepada presiden Megawati yang sedang berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003.

Dalam joint announcement by the prime minister of Japan and the president the Republic of Indonesia on the possibility of the economic partnership agreement antara Indonesia dan Jepang tersebut, yang di umumkan pada tanggal 8 september 2003 Megawati dan Koizuma sepakat untuk menugaskan kedua pejabat di kedua pemerintahan untuk melakukan pertemuan pendahuluan mendiskusikan kemungkinan pembentukan EPA antara Indonesia dan Jepang.

Pada tanggal 8 september 2003, pertemuan pendahuluan diadakan di tokyo, Jepang dan di isi dengan pembahasan mengenai pendangan kedua negara mengenai FTA. Pada tanggal 6 November 2004. Kepala Nippon Kaidaren, Hiroshi Okuda mengunjungi presiden SBY untuk meneruskan kembali pembicaraan mengenai FTA Indonesia dan Jepang. Sebetulnya inisiatif Jepang untuk membentuk EPA dengan Indonesia terkait dengan pembentukan EPA dengan ASEAN.Hal ini ditegaskan oleh PM Jepang Koizumi pada saat KTT ASEAN – Jepang di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002.

Selanjutnya, pada tanggal 15 desember 2004 Menteri Ekonomi Jepang Soichi Nakagawa menenmui Menko Indonesia Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan baru yang merupakan lanjutan dari penawaran insentif investasi pengusaha Jepang yang disampaikan kepada Presiden SBY pada pertemuan sebelumnya. Keesokan harinya pada tanggal 16 desember 2004 Nakagawa menemui Menteri perdganganMari Elka Pangestu menyepakati untuk membuat kelompok studi bersama (*Joint Study Group/*JSG) yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan FTA, biaya dan keuntungan serta sector-sektor apa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Hasil JSG merekomendasikan manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia – Japan Economic Partnersip Agreement* (IJEPA) yang kemudian di ikuti dengan seri perundingan negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak July 2005 sampai dengan November 2006 pada akhir negosiasi tanggal 24 november 2006 di tokyo kedua *Chef Negosiation ,* Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yamunaraka menandatangani Record of Discussion yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin. Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dengan kerangka wropupmeeting. Hasil negosiasitersebut berupa *Recordof Discussion* yang kemudian disepakati kedua *Chef Negosiator,* yaitu Ambassador Soemadi DM Bordiningrat dan Mr. Masaharu kohno, wakil Menteri Luar Negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *Pending Issue* dan merupakan *draft teks* dari sisi bahasa dan hukum**.[[11]](#footnote-11)**

Didalam perjanjian IJEPA, Jepang menyatakan komitmennya untuk membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya (capacity building) agar produk/jasanya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian atau Cooperation**.[[12]](#footnote-12)**

Konsep utama atau pilar dasar kerjasama FTA antara Indonesia dan Jepang adalah untuk meningkatkan daya saing industri masing-masing negara melalui :

* Liberalisasi akses Pasar
* Fasilitas
* Kerjasama melalui *capacity building* untuk sector-sektor industri prioritas**.[[13]](#footnote-13)**

Sementara itu Indonesia tentunya juga mengharapkan dengan adanya IJEPA dapat mendorong meningkatkan investasi Jepang di Indonesia yang selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun internasional.Jepang juga sebetulnya mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia, rakyat Indonesia adalah konsumen terbesar ke-empat di dunia, serta mempunyai daya beli yang sangat tinggi**.[[14]](#footnote-14)**

1. **Tujuan dan Prinsip Dasar Terbentuknya IJEPA**

EPA antara Indonesia dan Jepang terbentuknya atas kesepakatan antara dua kepala negara untuk mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin sangat lama antara kedua negara tersebut.

Dalam peningkatan kerjasama, Indonesia dan Jepang sepakat membangun perjanjian kemitraan ekonomi atau *Economic Partnership Agreement* (EPA). Tujuan IJEPA adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan bebas, jasa, dan investasi, fasilitas dan kerja sama ekonomi Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang (proper balance), khususnya menyangkut aspek kerjasama guna membangun kapasitas ekonominya**.[[15]](#footnote-15)**

Adapun tujuan IJ-EPA adalah untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia yang diharapkan selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional dan internasional. Peningkatan investasi dapat membuka sekaligus penyerapan tenaga kerja yang besar di Indonesia. Dalam IJ-EPA, untuk perdagangan barang disepakati moda penurunan tarif bea masuk dilakukan secara bertahap, dimana dalam penurunan tarif tersebut terdapat beberapa kategori produk, salah satunya adalah produk yang masuk dalam skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS). USDFS adalah pemberian fasilitasi yang dipercepat untuk produk Jepang yang masuk ke Indonesia terkait dengan industri driven sector (otomotif, elektronik, alat berat, dan pembangkit energi) dengan syarat utama digunakan sebagai bahan baku dan belum diproduksi / tidak ekonomis dibuat di dalam negeri. Sebagai kompensasi terhadap pemberian fasilitas USDFS oleh Indonesia, pihak Jepang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan daya saing produknya, sehingga bisa melewati batas toleransi hambatan non tarif di Jepang.

Bantuan Jepang tersebut tertampung dalam elemen cooperation, dan khusus untuk produk industri difokuskan pada pengembangan industri manufaktur atau disebut Manufacturing Industri Development Center (MIDEC). MIDEC berfungsi sebagai motor penggerak untuk pembangunan kapasitas industri (industrial capacity building) guna meningkatkan daya saing produk industri Indonesia yang meliputi tiga belas sektor, yaitu metal working, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion, SME’s, automotives, electric/electronics, steel/ steel products, textile, petrochemical & oleochemicals, nonferrous, dan food & beverages.

Kedua negara tersebut juga telah sepakat untuk bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai penting, seperti kebebasan, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan aturanhukum serta untuk mengatasi tantangan-tantangan baru di tingkat bilateral, regional dan global. Indonesia dan Jepang juga berkomitmen untuk mengatasi tantangan ekonomi dan strategis baru dan mencari peluang baru, baik yang disajikan oleh globalisasi, bersama-bersama melalui kerjasama bilateral konkrit**.[[16]](#footnote-16)**

EPA Indonesa-Jepang memiliki 3 pilar, yaitu **:[[17]](#footnote-17)**

* 1. Fasilitas Perdagangan dan Investasi, yaitu upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang, serta kerjasama di bidang prosedur kepabean, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual.
  2. Liberalisasi, yaitumenghapuskan atau mengurangi hambatan pedagangan dan investasi.
  3. Kerjasama, yaitu kesepakatan untuk kerjasama dalam bidang industri manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan promosi.

1. **Sektor – Sektor Dalam IJEPA**

Di dalam perjanjian kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA terdapat beberapa sektor kerjasama, yaitu :

1. Trade in goods (perdagangan)

Dalam bidang perdagangan, mempunyai perdagangan yang sama bahwa IJEPA sebaiknya memasukkan perjanjian di bidang perdagangan yaitu, penurunan biaya tarif adalah elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara kedua negara. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang lebih dikenal dengan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) telah menandatangani oleh kedua pemimpin negara pada tanggal 20 Agustus 2007 yang lalu.

1. Rules of Origin (peraturan dasar)

Kedua belah pihak mempunyai pandangan bahwa peraturan baik di bawah ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement maupun dibawah EPA bilateral disatukan satu sama lain.

1. Custom Procedure (prosedur tentang ekspor impor dan bea Cukai)

Kedua pihak akan memberikan informasi dan pertukaran dengan maksud memfasilitasi perdagangan. Pihak Jepang menunjukan keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan menjamin keamanan adalah penting dalam bidang ekspor-impor dan bea cukai. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan kemungkinan ekspor-impordan bea cukai lewat perbaikan lebih lanjut terhadap kekurangan dari ekspor-impor dan bea cukai, fasilitas ekspor-impor dan bea cukai, menyeragamkan dari penggunaan peraturan-peraturan, dan lain-lain.

Berdasarkan opini tersebut pihak Jepang mengatakan bahwa untuk ekspor-impor dan bea cukai harus dimasukkan dalam EPA. Dengan point-point berikut ini :

1. Memastikan tidak ada kelemahan
2. Kerjasama dan pertukaran informasi antara yang bertanggung jawab atas ekspor impor dan bea cukai dengan maksud untuk memperlancar aktifitas perdagangan melalui penyederhanaan dan keselarasan dari ekspor-impor dan bea cukai, dan menjamin pelaksanaan menentang perdagangan barang-barang gelap
3. Pengakuan yang pantas dalam melaksanakan mekanisme. Pihak Indonesia memberikan Informasi mengenai ekspor-impor dan bea cukai, yang sudah disederhanakan. Dalam hal ini, pihak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha terus menerus memperbaiki prosedur ekspor-impor dan bea cukai. Pihak Indonesia mempunyai pandangan atas pentingnya kerjasama antara kedua belah pihak yang berwenang dalam bidang diatas.
4. Trade In Service (Perdagangan Jasa)

IJEPA akan menyediakan mekanisme untuk perbaikan lingkungan peusahaan dan promosi keyakinan perusahaan, dengan partisipsi kedua Pemerintah Indonesia dan Jepang, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lainnya. Pihak Jepang memberikan perhatiannya di bidang liberalisasi jasa yang berhubungan dengan pembuatan jasa, informasi dan pelayanan keuangan, dan pelayanan hukum. Pihak Jepang menjelaskan bahwa pembuatan pelayanan dapat membantu perbaikan prasarana di Indonesia, dan pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Industri Pabrik yang mana pihak Jepang penanam modal terbesar dalam bidang ini diantara penanam modal lainnya dalam bidang ekonomi yang ada di Indonesia.

Pihak Indonesia juga memberikan perhatiannya dalam pelayanan di bidang liberalisasi, termasuk pelayanan kepariwisataan, informasi dan komunikasi, transportasi maritime, pembuatan, pendidikan, dan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Pihak Indonesia juga menerangkan adanya kemajuan dalam bidang liberalisasi yang sudah dilakukan di bawah WTO (*World Trade Organization*) dalam bidang perdagangan dan pelayanan keuangan. Sejauh ini pelayanan distribusi, pihak Indonesia menerangkan bahwa area ini sudah dibuka untuk partisipasi asing.

1. *Investment*(Investasi)

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi Investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara tujuan, menurun sejak krisis ekonomi.

* Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah di sektor otomotif/suku cadang, elektrik/elektronik, dan sektor kimia serta peralatan kantor :

1. Memperdalam struktur Industri dengan investasi industri pendukung (componen, parts, mould and dies), dimana supplier Indonesia dapat juga berkembang dengan fasilitas dari Manufacturing Industry Development Center (MIDEC),
2. Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan, perhutanan, dimana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerjasama;

* Investasi di bidang energi, termasuk di bidang bio-fuel yang juga akan difasilitasi melalui proyek kerjasama;
* Di bidang Jasa, aliran terbesar adalah di sektor keuangan dan asuransi, perdagangan, transportasi dan real estate;

1. *Movement of Natural Person*(pergerakan alami manusia)

Kedua belah pihak akan menyediakan kerangka ini, kerangka memudahkan perpindahan manusia di berbagai kategori termasuk pengunjung perusahaan jangka-pendek, intra-bisnis transferces, penanam modal dan servis professional. Di konteks sama, kedua belah pihak juga akan menyediakan penerimaan bagi jururawat maupun pengasuh. Kedua belah pihak juga akan menjalin kerjasama berhubungan maupun secara mendukung akan mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan hotel lapisan “Program Masa Magang Melatih dan Teknik yang Industri” menceritakan servis.

1. *Government Procurement* (Pengadaan Pemerintah)

IJEPA akan menyediakan kerangka untuk pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua Pemerintah, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lain. Kedua pihak akan memajukan kerjasama teknik di bidang ini dengan pandangan untuk meningkatkan transparansi.

1. *Intellectual Proverty Rights* (Hak Milik Intelektual)

Pihak Jepang memandang hak milik interlektual (IP) sebagai elemen penting untuk memilih tujuan investasi mereka, dan perlu memperbaiki lingkungan Indonesia untuk perlindungan IP untuk promosi investasi oleh perusahaan Jepang. Pihak Jepang menegaskan pendapatmya sebagai berikut :

1. Perbaikan dan perlindungan sistem IP
2. Peningkatan Kerjasama Internasional
3. Meluruskan dan meningkatkan transparansi administrative procedure
4. Meningkatkan kesadaran umum atas perlindungan IP dan
5. Peningkatan palaksanaan.

Kedua pihak akan menjamin perlindungan memadai IP untuk memajukan efisiensi dan transparansi di administrasi IP, perlindungan sistem, dan memperhitungkan ukuran untuk pelaksanaan hak-hak milik intelektual melawan pelanggaran, memalsukan dan pembajakan. IJEPA akan menyediakan untuk kedua belah pihak untuk bekerjasama di hak bidang intelektual.

1. *Competition Policy* (kebijakan mengenai persaingan usaha)

Kedua belah pihak akan memajukan persaingan oleh menyapa kontrak aktivitas bersaing di wilayah masing-masing maupun bekerja sama dalam memperkuat kebijakan dan pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, sesuai undang-undang dan peraturan masing-masing mereka.

Kedua belah pihak mempunyai pandangan atas pentingnya usaha yang sama dalam kebijakan persaingan usaha di bawah IJEPA. Pihak Jepang menekankan bahwa maksud diskusi dari kebijakan di bawah EPA akan mencegah aktifitas anti-persaingan di wilayah kedua negara yang menghalangi dari keuntungan liberalisasi dan investasi, sedangkan pihak Jepang menunjukan upaya meningkatkan standar usaha baik kerjasama pelaksanaan dan kerjasama teknik sebaliknya kedua negara kerjasama di bawah EPA yang mana Indonesia adalah salah satunegara yang paling maju diantara negara ASEAN dalam syarat-syarat usaha dalam persaingan dan kebijakan bidang usaha.

10) *Energy dan Mineral Resources* (Sumber Daya Energi dan Mineral)

Pihak Jepang menyebutkan bahwa bidang sumber penghasilan barang tambang dan energy, adalah bidang penting untuk Jepang, dan sebaiknya dibicarakan dalam IJEPA, yaitu : (a) perbaikan lingkungan investasi (b) mendapatkan sumber barang tambang dan energy dalam keadaan darurat. Pihak Jepang juga mengajak Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi, dan pentingnya sumber barang tambang dan energi serta sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini.

Pihak Indonesia mengungkapkan bidang energy adalah satu bidang penting dalam kebanyakan bidang kerjasama IJEPA, dan kedua belah pihak akan memperkuat dialog kebijkan dan kerjasama dalam bidang ini. Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang jatuh pada tahun 2010-2011, Jepang dan Indonesia melakukan lobi-lobi diplomatik. Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi.

11) *Cooperation* (Kerjasama)

Kedua belah pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembuatan Industri, pertanian, perikanan, dan kehutanan, perdagangan dan investasi, perkembangan sumber penghasilan, kepariwisataan, informasi dan teknologi komunikasi, servis keuangan, usaha pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara mereka**.[[18]](#footnote-18)**

1. ***Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)**

Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan Jepang 25 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000-an, EPA sebenarnya merupakan konsep kerjasama ekonomi global yang mau tidak mau harus dilakukan oleh suatu negara jika tindak ingin tertinggal dalam persaingan ekonomi global, bahkan bisa menjadi korban dari perkembangan perdagangan internasional. Jepang saat ini sudah melakukan kesepakatan EPA dengan delapan Negara yakni, Meksixo, Chili, dan enam negara ASEAN (Association of South East Asia Nation), yaitu Singapura, Thailand yang lebih dulu menandatangani EPA pada tahun 2002, Thailand pada tahun 2003, Malaysia pada tahun 2005, Filiphina pada tahun 2006, Brunei Darussalam pada tahun 2006 dan Indonesia pada tahun 2007.

Bagi Jepang abad 21 adalah abadnya bagi Asia, sehingga fokus kebijakannya juga fokus meng-Asia, agar cepat diterima mitra Asianya, Jepang pun mengusung motto Mutual Prosperity with Asia (kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia) lewat EPA**.[[19]](#footnote-19)**

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang diilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJEPA adalah sebuah Free Trade Agreement New-Age (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (World Trade Organisation Plus) (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*Capasitas Building*) sebagai bagian dari Partnership Agreement.

Tidak seperti perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, IJEPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya Liberalisasi, namun juga sektor lainnya, antara lain, Jasa, Investasi, Energi, dan lain sebagainya, yang mencakup dalam Tiga Pilar Utama, yaitu :

1. Fasilitas perdagangan dan Investasi

* Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang.
* Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan , HKI standar

1. Liberalisasi : Menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)
2. Kerjasama : Kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA**.[[20]](#footnote-20)**
3. **Kesepakatan Penurunan Dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Sektor Industri Dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)**
   * 1. **Kebijakan Deregulasi**

Deregulasi menunjuk kebijakan untuk mengurangi atau meniadakan aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal, barang dan jasa.Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu. Volume bisnis swasta diharapkan melonjak. Menurut Peltzman dan Becker dalm Teori Ekonomi, terdapat dua macam perubahan ekonomi yang mempengaruhi deregulasi, yaitu :

(1) adanya gap antara keseimbangan regulasi dan karakteristik deregulasi industri, sehingga regulasi menjadi tidak ada artinya, atau,

(2) kekayaan yang akan diredistribusikan semakin sedikit karena adanya kepentingan politik di dalam regulasi.

Pada industri yang kompetitif, biaya yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah produsen dan menghasilkan surplus konsumen dalam jangka pendek. Surplus konsumen yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan kemungkinan terjadinya koalisi dari beberapa produsen dalam menentukan deregulasi**.[[21]](#footnote-21)**

Tujuan umum deregulasi :

* Memerangi ekonomi biaya tinggi
* Mengurangi ongkos produksi
* Mengurangi harga jual barang bagi konsumen**.[[22]](#footnote-22)**
  + 1. **Kesepakatan Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam IJEPA**

Sesuai dengan salah satu sektor yang disepakati dalam perundingan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) adalah perdagangan dalam barang (*trade in good*) yaitu mengenai pengurangan atau penghapusan tarif terutama pada tarif tertinggi atau tarif eskalasi dan juga dalm hambatan non-tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian dispute mengenai mutu barang. Di dalam suatu perdagangan antara Indonesia dengan Jepang memberlakukan tarif bea masuk dimana hamper semua pos tarif targetkan untuk segera dihapuskan. Isu tarif terutama bea masuk dalam kerjasama IJEPA ini menjadi sangat penting dan akan menjadi peluang serta manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, dan juga akan memberi perluasan perdagangan dan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara kedua negara**.[[23]](#footnote-23)**

Kesepakatan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk yang disepakati diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu *fast-track,* dan pengecualian dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri domestik**.[[24]](#footnote-24)**

Untuk produk klasifikasi *fast-track,* persentase tertentu dari total pos tarif akan diturunkan ke 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Bagi produk klasifikasi *normal-track,* tarif diturunkan menjadi 0 % pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJEPA bagi presentase tertentu dari total pos tarif. Di samping konsesi tariff tersebut, diatur pula suatu skema konsesi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan kompensasinya melalui fasilitas pusat pengembangan industri manufaktur**.[[25]](#footnote-25)** Untuk lebih jelas dapat dilihat dalm tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**

**Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia Jepang**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategori** | **Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk** |
| A | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi. |
| B3 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B5 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B7 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B10 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B15 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| X | Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN. |
| P | Tarif Bea Masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II . |

Ket :

1. Fast –track (Kategori A)
2. Bertahap (Kategori B dan P dengan catatan), dan
3. Pengecualian (Kategori X)

Sumber: http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=IJEPA

**Tabel 2.2**

**Catatan-Catatan Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia Jepang**

|  |  |
| --- | --- |
| **Catatan** | **Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk** |
| 1 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:   * Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. * Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. * Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010. |
| 2 | Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS). |
| 3 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 15% pada tanggal implementasi. * 12% pada tanggal 1 Januari 2016. |
| 4 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:   * Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. * Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. * Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009. |
| 5 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 20% pada tanggal implementasi. * 16% pada tanggal 1 Januari 2016. |
| 6 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 10% pada tanggal implementasi. * 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah. |
| 7 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:   * Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. * Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari. * Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010. |
| 8 | Tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 10% pada tanggal implementasi * 8% pada tanggal 1 Januari 2009 * 6% pada tanggal 1 Januari 2010. * 4% pada tanggal 1 Januari 2011 * 0% pada tanggal 1 Januari 2012 |
| 9 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:   * Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. * Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari * Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011. |
| 10 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:   * Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. * Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari * Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009. |
| 11 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 8% pada tanggal implementasi. * 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah. |
| 12 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 8% pada tanggal implementasi. * 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016. |
| 13 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 60% pada tanggal implementasi. * 20% pada tanggal 1 Januari 2012. * 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah. |
| 14 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 45% pada tanggal implementasi. * 20% pada tanggal 1 Januari 2012. * 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah. |
| 15 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:   * 40% pada tanggal implementasi. * 20% pada tanggal 1 Januari 2012. * 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah. |

**Sumber: http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=IJEPA**

Perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian keistimewaan tarif oleh kedua belah pihak. Dari pihak Indonesia, keistimewaan yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93 % dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produksi klasifikasi *fast-track,* sekitar 35 % dari pos tarif akan diturunkan hingga 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi *normal track*, sekitar 58 % dari pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0 % dalam masa tiga hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7 % merupakan produk yang dikecualikan dari pos tarif IJEPA**.[[26]](#footnote-26)**

Jepang memberikan kepada Indonesia perlakuan khusus tarif di lebih dari 90% dari pos tarif Jepang yang berjumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos-pos tarif tersebut mencakup 90 % dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekita 80 % dari total pos tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Sementara itu, produk-produk dalam klasifikasi normal track sekitar 10 % dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0 % secara bertahap dalm waktu tiga hingga sepuluh tahun sejak berlakunya IJEPA. Sedangkan 10 % sisanya akan dikecualikan dari skema tarif IJEPA**.[[27]](#footnote-27)**

1. **Barang-Barang yang Diturunkan Tarif Bea Masuk**
2. **Bidang Industri**

Dalam bidang Industri, kedua belah pihak menyatakan minat untuk penghapusan tarif dalam beberapa bidang. Pihak Jepang menyatakan minat penurunan tarif pada barang-barang otomotif dan bagian-bagian otomotif, listrik, dan elektronik, baja, dan tekstil, yang mana pihak Indonesia menetapkan tarif yang cukup tinggi pada beberapa produk tersebut.

Perbaikan akses pasar di Jepang meliputi tarif di hampir seluruh barang impor dari Indonesia yang dilakukan mulai tahun 2010. Jepang juga berinisiatif untuk membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam Industri manufaktur.

Industri otomotif dan bagian-bagian otomotif Jepang menyatakan bahwa penghapusan tarif langsung pada prinsipnya diperlukan untuk memperkuat kerjasama dengan mitra lokal di Indonesia melalui kemitraan usaha dalam bentuk investasi serta divisi dilengkapi sistem kerja di bagian-bagian otomotif.

Pihak Indonesia menyatakan minat untuk penurunan tarif pada berbagai bahan kimia organik, kantong plastik, produk kaca, tekstil dan alas kaki, yang mana Jepang mempertahankan tarif serta kewajiban khusus yang signifikan pada beberapa produk.

1. **Bidang Pertanian**

Pada bidang pertanian, kedua negara menyatakan masih terdapat produk yang dikategorikan produk sensitive dalam bidang pertanian, perhutanan, dan perikanan.

Kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif sebagian besar komoditi pertanian dalam jangka waktu 10 tahun. Komoditi-komoditi yang disepakati, yaitu; atas permintaan Jepang, Indonesia akan menghapuskan tarif pada komoditi anggur segar, apel segar, peach segar termasuk nektarines, persimmon segar, sedangkan atas permintaan Indonesia, Jepang akan membuka pasarnya untuk buah-buah tropis seperti manga, manggis, rambutan, alpukat, durian. Namun untuk beberapa produk pertanian dikenakan *Tariff Rate uota* (TR ), yaitu nanas dan pisang karena kedua produk tersebut masuk ke dalam kategori sensitive bagi Jepang.

Sebelum berlakunya EPA (*Economic Partnership* Agreement) Indonesia-Jepang, beberapa produk pertanian tertentu dari Indonesia tidak dapat menembus pasar Jepang karena produk tidak dapat memenuhi persyaratan standar produk Jepang termasuk kesehatan, sanitasi, dan standar phyto-sanitay. Pisang, nanas dan mangga merupakan contoh dari produk pertanian Indonesia yang mendapat keuntungan dari peningkatan pasar yang disediakan oleh EPA.

Kerjasama IJEPA juga akan memberikan petani Indonesia bantuan teknis termasuk teknik pengobatan termal untuk pemberantasan lalat buah.

1. **Bidang Perikanan**

Pada bidang perikanan, menunjukan bahwa kedua negara bersaing pada sumber daya perikanan terutama produk tuna dan ikan cakalang, kedua negara menyatakan prihatinan mereka bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengancam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan dan berpengaruh negative pada manajemen sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih bermanfaat bagi kemitraan ekonomi kedua negara untuk lebih memperkuat yang ada hubungan kerja sama mengenai pengelolaan sumber daya perikanan.

Kedua belah pihak mengakui pentingnya mengambil langkah lebih jauh menuju diselenggarakan manajemen sumber daya perikanan, khusus untuk menghilangkan *Ilegal Unregulated dan Unreported* (IUU) *fishing* di sekitar perairan Indonesia. Kedua belah pihak mengakui pentingnya kerjasama untuk menyelidiki sumber daya perikanan di perairan Indonesia sebagai peluang bisnis masa depan di Indonesia.

1. **Bidang Kehutanan**

Pada bidang kehutanan, pihak Jepang menyatakan sensitivitas pada sektor panel kayu. Organisasi Jepang yang mewakili kepentingan kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan produsen papan serat meyatakan keprihatinan mereka tentang situasi saat ini di mana daya saing produksi dalam negeri kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan papan serat menurun karena penurunan tarif.

1. http://id.wikipedia.org/wifi/Bea\_masuk. diakses pada tanggal 05 Maret 2016 Pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://lilysukasuka.blogspot.com/2012/03/kerjasama-ekonomi-internasional.html diakses pada tanggal 14 Maret 2016 Pukul 13.30 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Op cit. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/10/08/indonesia-jepang-dalam-hubungan-bilateral-493989.html diakses pada tanggal 9 April 2016 Pukul 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Hubungan Perekonomian Indonesia – Jepang”, dalam http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\_id.html#2, di akses pada tanggal 30 Maret 2016 Pukul 14.10 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sigit setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, dalam http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2014/kajian/pkrb/03.%20Dampak%20IJEPA.pdf, di akses pada tanggal 2 April 2016 Pukul 21.00 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. http://edimirantojelajahpena.wordpress.com diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Achdiat Atmawinata, Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, Departemen Perindustrian, Desember 2008, h. 3-16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syamsul Hadi, *Kerjasama Indonesia-Jepang,* Kompas, senin 20 Agustus 2007. [↑](#footnote-ref-13)
14. Op. Cit. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. “Joint Statement At The Signing Of The Agreement Between Japan and The Republic Of Indonesia For An Economic Partnership”, dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-pacific/indonesia/epa0708/joint.html, diakses pada Widiana Puspitasari, *Op. cit.*tanggal 18 Maret 2016 Pukul 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Widiana Puspitasari, *Op. cit.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. http://www.pjinews.com diakses pada tanggal 16 Maret 2016 Pukul 10.50 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
20. http://elib.unikom.ac.iddiakses pada tanggal 16 Maret 2016 Pukul 20.30 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. http://maswig.blogspot.com/2008/11/teori-ekonomi-regulasi-dan-deregulasi.html diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 14.40 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. http://rahayusimanungkalit.blogspot.com/2011/02/kebijakan-perekonomian-1.html diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 14.50 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-derlianani-26719-8-unikom\_d-v.pdfdiaskes pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 15.03 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, dalam http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2014/kajian/pkrb/03.%20Dampak%20IJEPA.pdf, diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 15.10 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)